

**ANALISIS PEMBANGUNAN REKLAMASI LAHAN *CENTRE*  
*POINT OF INDONESIA* TERHADAP KEMISKINAN  
NELAYAN DI KELURAHAN PANAMBUNGAN**

***THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF RECLAMATION  
CENTRE POINT OF INDONESIA TOWARDS THE POVERTY  
OF FISHERMEN IN PANAMBUNGAN SUB-DISTRICT***

**JIHAN MIRANDA**

**E 0311 81 002**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**ANALISIS PEMBANGUNAN REKLAMASI LAHAN *CENTRE*  
*POINT OF INDONESIA* TERHADAP KEMISKINAN  
NELAYAN DI KELURAHAN PANAMBUNGAN**

**JIHAN MIRANDA**

**E 0311 81 002**



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PEMBANGUNAN REKLAMASI LAHAN CENTRE POINT OF INDONESIA TERHADAP KEMISKINAN NELAYAN DI KELURAHAN PANAMBUNGAN

Disusun dan Diajukan oleh

**JIHAN MIRANDA**

**E031181002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.  
NIP. 19640419 198903 2 002

Pembimbing II

Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D  
NIP. 19630827 199103 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP UNHAS



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D

NIP. 19630827 199103 1 003

## LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh

**NAMA** : JIHAN MIRANDA  
**NIM** : E031181002  
**JUDUL** : ANALISIS PEMBANGUNAN REKLAMASI LAHAN  
*CENTRE POINT OF INDONESIA* TERHADAP  
KEMISKINAN NELAYAN DI KELURAHAN  
PANAMBUNGAN

Pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Tempat: Ruang Ujian Departemen Sosiologi dan via Zoom

### Tim Evaluasi

**KETUA** : Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. (.....)  
**SEKRETARIS** : Sultan, S.Sos, M.Si (.....)  
**ANGGOTA** : Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D (.....)  
Dr. Iqbal Latief, M.Si (.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : JIHAN MIRANDA

NIM : E031181002

JUDUL : ANALISIS PEMBANGUNAN REKLAMASI LAHAN  
CENTRE POINT OF INDONESIA TERHADAP  
KEMISKINAN NELAYAN DI KELLURAHAN  
PANAMBUNGAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Januari 2022

Yang menyatakan



JIHAN MIRANDA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

***“It’s nice to be important but it’s more important to be nice” – Dwayne Johnson***

Skripsi ini ku persembahkan kepada sosok hebat dalam hidupku yaitu:

Diriku sendiri yang tidak henti-hentinya berjuang dan bertahan sampai sejauh ini.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas kuasa dan Ridha-Nya lah skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhir. Selesainya skripsi ini yang berjudul “Analisis Pembangunan Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia Terhadap Kemiskinan Nelayan di Kelurahan Panambungan” yang bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Kota Makassar.

Terima kasih kepada orang-orang hebat dalam hidup saya, Keluarga besar dan Diri saya sendiri atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku, yang selalu mengiringi langkahku sampai bisa menyelesaikan program pendidikan S1 di kampus kebanggaan Universitas Hasanuddin. Semoga Tuhan menyertai kalian dalam kebaikan.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis dihadapkan begitu banyak dukungan, bimbingan, perhatian, dan bantuan serta petunjuk/arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya dengan melibatkan seluruh perasaan syukur ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. Hasbi. M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen dan Bapak Dr. M.Ramli AT, M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
4. Pembimbing utama Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A yang senantiasa meluangkan waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
5. Pembimbing Bapak Drs. Hasbi. M.Si, Ph.D yang senantiasa meluangkan waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
6. Penguji utama Bapak Dr. Iqbal Latief, M.Si yang saya hormati dan senantiasa meluangkan waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
7. Penguji Bapak Sultan S.Sos, M.Si yang saya hormati dan senantiasa meluangkan waktu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
8. Staff rektorat terutama Sekretaris Rektor Universitas Hasanuddin kepada ibu Dana yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk mendukung kelancaran penyusunan berkas yang diperlukan
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Sosiologi FISIP Unhas yang telah mendidik saya hingga mampu menyelesaikan studi dengan baik.
10. Seluruh Nelayan Kelurahan Panambungan Makassar yang telah menyambut saya dengan hangat dan meluangkan waktunya untuk menjadi para responden yang hebat dan sangat ramah meluangkan pengalaman hidup yang berharga bagi penulis

11. Kakak Mizni Zaharanil Ilmi, S.Sos dan kakak Gusti Ani, S.Sos dan kepada kakak-kakak yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya yang selalu memberikan support kepada saya selama menyelesaikan masa studi di Universitas Hasanuddin.

10. Sahabat saya Putri Ainun Ratna Alwi, Nuramalia dan Ema Riska Amalia dan seluruh teman-teman Positivis 18 yang tidak terhingga kebaikannya yang telah memberikan dukungan mental, fisik, maupun doa selama menyelesaikan masa studi serta menjadi keluarga meski tanpa ikatan darah.

11. A. Nurul Fajri Ekaputri Ilham, S.Ked teman hidup saya yang tidak henti-hentinya menjadi alasan saya untuk tetap menempuh perjalanan yang cukup panjang.

12. Semua orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi dan semua orang yang membaca skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat berharap banyak masukan berupa saran maupun kritik dari semua pembaca agar tradisi keilmuan tetap terjaga dalam diri kita.

Makassar, 10 Januari 2022

JIHAN MIRANDA

## ABSTRAK

**Jihan Miranda, E031181002. “Analisis Pembangunan Reklamasi Lahan *Centre Point Of Indonesia* Terhadap Kemiskinan Nelayan di Kelurahan Panambungan” dibimbing oleh Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Hasbi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan dan faktor-faktor pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan, serta peran CSR *Centre Point of Indonesia* dalam mengatasi kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dasar Penelitian ini adalah survei. Populasi nelayan sebanyak 62 orang. Teknik penarikan sampel yaitu systematic random sampling. Sampel dari penelitian ini diperoleh menggunakan rumus Slovin, dengan error level (tingkat kesalahan) yaitu 10% atau 0,1 dengan hasil 38 responden.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* memberikan dua dampak bagi kehidupan nelayan di kelurahan Panambungan, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah menjadikan kawasan pantai di kelurahan Panambungan lebih indah dipandang oleh para nelayan. Namun akibat yang dominan dialami oleh nelayan malah dampak negatif, antara lain berupa penurunan pendapatan, risiko kecelakaan bagi nelayan dan banjir di beberapa titik di kelurahan Panambungan. Faktor pembangunan yang memicu kemiskinan nelayan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pertama, penyempitan lahan tangkap. Kedua, akses jalur tangkap semakin jauh dan membahayakan, akses jalur ke lahan tangkap berada tepat di bawah jembatan beton Toraja di CPI mengancam keselamatan nelayan dan transportasi yang digunakan nelayan. Ketiga, waktu kerja efisien di lahan tangkap nelayan. Keempat, ketidaktersediaan akses informasi yang dapat diperoleh nelayan terkait mengasah *softskill* maupun akses informasi terkait perkembangan pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia*. Kelima, ketidaktersediaan akses kelembagaan yang menaungi perlindungan hak-hak nelayan. Akses jalur alternatif yang disediakan masih tergolong tidak aman bagi para nelayan, peneliti melihat akses jalur alternatif yang sangat sempit dan memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi dengan menabrak pilar penyanggah jembatan CPI yang tidak dibuat melayang seperti pilar-pilar lainnya.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni mengevaluasi kembali kebijakan yang terkait guna menanggulangi kemiskinan nelayan

Kata Kunci: Pembangunan, Reklamasi, *Centre Point of Indonesia*, Kemiskinan, Nelayan

## ABSTRACT

***Jihan Miranda, E031181002. "The Analysis Of Development Of Reclamation Centre Point Of Indonesia Towards The Poverty Of Fishermen In Panambungan Sub-District" was guided by Dwia Aries Tina Pulubuhu and Hasbi.***

*This study aims to determine the impact of Center Point of Indonesia land reclamation development on fishermen poverty in Panambungan Village and the factors of Center Point of Indonesia land reclamation development on fishermen poverty, as well as the role of Center Point of Indonesia CSR in overcoming fishermen poverty in Panambungan Village.*

*The approach used in this research is a quantitative descriptive approach with descriptive research type. The basis of this research is a survey. The population of fishermen is 62 people. The sampling technique is systematic random sampling. The sample from this study was obtained using the Slovin formula, with an error level (error rate) of 10% or 0.1 with the results of 38 respondents.*

*The results obtained from this study are that the land reclamation construction of Center Point of Indonesia has two impacts on the lives of fishermen in Panambungan village, namely positive impacts and negative impacts. The positive impact is from making the coastal area in Panambungan village more beautiful for the fishermen to see and the impact that dominates the fishermen's life is the negative impact in the form of a decrease in income, the risk of accidents for fishermen and flooding at several points in Panambungan village. The development factors that trigger fishermen's poverty based on the results of this study are first, the narrowing of fishing grounds. Second, the access to the fishing line is getting further and more dangerous, the access route to the fishing ground is right under the Toraja concrete bridge at CPI, threatening the safety of fishermen and the transportation used by fishermen. Third, efficient working time in fishermen's fishing grounds. Fourth, the unavailability of access to information that can be obtained by fishermen related to honing soft skills and access to information related to the development of land reclamation at the Center Point of Indonesia. Fifth, the unavailability of institutional access to protect the rights of fishermen. The alternative route access provided is still considered unsafe for fishermen, researchers see that the alternative route access is very narrow and has a high level of accident risk by hitting the pillars supporting the CPI bridge which are not made to float like other pillars.*

*Suggestions that can be given in this study are to re-evaluate related policies to reduce fishermen's poverty*

***Keywords: Development, Reclamation, Center Point of Indonesia, Poverty, Fishermen***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	9
A. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	9
B. Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia .....	10
1. Pengertian Reklamasi .....	10
2. Syarat dan Kebijakan Reklamasi .....	11
3. Persyaratan Teknis Pengambilan, Pengerukan, dan Penimbunan Material Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wajib:.....	13
C. Pandangan Mengenai Kemiskinan dan Teori Pembangunan .....	14
D. Dampak Pembangunan Terhadap Kemiskinan Nelayan .....	22
1. Dampak Positif .....	24
2. Dampak Negatif.....	25
E. Faktor-Faktor Kemiskinan Nelayan .....	26
G. Kerangka Konseptual .....	32
H. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A.    Jenis Penelitian .....	41
B.    Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
C.    Tipe dan Dasar Penelitian.....	42
D.    Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
E.    Teknik Penarikan Sampel.....	43
F.    Variabel Penelitian .....	46
G.    Definisi Operasional .....	46
H.    Teknik Pengumpulan Data .....	48
I.    Teknik Analisis Data .....	51
J.    Teknik Penyajian Data .....	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	55
A.    Keadaan Geografi Kecamatan Mariso.....	55
B.    Keadaan Demografi Kecamatan Mariso.....	57
C.    Keadaan Geografi Kelurahan Panambungan.....	58
D.    Keadaan Demografi Kelurahan Panambungan.....	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	64
A.    Karakteristik Responden .....	65
B.    Dampak Pembangunan Reklamasi Lahan <i>Centre Point of Indonesia</i> Terhadap Kemiskinan Nelayan Panambungan .....	69
C.    Faktor- faktor Pembangunan Reklamasi Lahan <i>Centre Point of</i> <i>Indonesia</i> Terhadap Kemiskinan Nelayan.....	71
D.    Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan dengan Adanya Pembangunan Reklamasi Lahan <i>Centre Point of Indonesia</i> .....	
E.    Peran CSR Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Panambungan.....	93
F.    Pembahasan.....	
BAB VI PENUTUP .....	122
A.    Kesimpulan.....	122
B.    Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN I.....	130
LAMPIRAN II .....	136

LAMPIRAN III.....	138
LAMPIRAN IV.....	144

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Klasifikasi Umur Responden.....	63
Gambar 5. 2 Status Perkawinan Responden.....	64
Gambar 5.3 Jumlah Tanggungan Responden.....	65
Gambar 5. 4 Status Pekerjaan Sampingan .....	66
Gambar 5. 5 Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan.....	67
Gambar 5. 6 Waktu Efisien di Lahan Tangkap Sebelum Reklamasi .....	73
Gambar 5. 7 Waktu Efisien di Lahan Tangkap Setelah Reklamasi .....	74
Gambar 5. 8 Rata-rata Pendapatan Sebelum Reklamasi .....	78
Gambar 5. 9 Rata-rata Pendapatan Setelah Reklamasi .....	79
Gambar 5.10 Pengeluaran BBM Responden Sebelum Pembangunan Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia.....	82
Gambar 5.11 Pengeluaran BBM Responden Setelah Pembangunan Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia.....	83
Gambar 5.12 Pengeluaran Bahan Pokok Rumah Tangga Responden Sebelum Reklamasi .....	85
Gambar 5.13 Pengeluaran Bahan Pokok Rumah Tangga Setelah Reklamasi.....	86
Gambar 5.14 Reklamasi Berpengaruh terhadap Pendidikan Anak .....	90
Gambar 5.15 Kondisi Kesehatan Nelayan .....	93
Gambar 5.16 Pengetahuan Nelayan Tentang Keberadaan CSR.....	94
Gambar 5.17 komunikasi dengan CSR CPI.....	95
Gambar 5.18 Program bantuan CSR CPI.....	96
Gambar 5.19 Akses Jalur Alternatif.....	99

## DAFTAR TABEL

Table 4.1 Distribusi penduduk di masing-masing kelurahan.....	54
Table 4.2 Distribusi Jumlah Penduduk Masing-masing Kelurahan.....	55
Table 4.3 Distribusi Penduduk di Kelurahan Panambungan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Table 4.4 Keyakinan Penduduk Kelurahan Panambungan .....	59
Table 4.5 Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panambungan .....	61
Tabel 5.1 Pendapat Responden Terkait Dampak Negatif Pembangunan Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia .....	70
Tabel 5.2 penyempitan lahan tangkap.....	71
Tabel 5.3 Akses Jalur Tangkap .....	72
Tabel 5.4 Waktu Efisien di Lahan Tangkap.....	75
Tabel 5.5 Akses Informasi yang Diperoleh Nelayan .....	76
Tabel 5.6 Akses Kelembagaan yang Menaungi Perlindungan Nelayan .....	77
Tabel 5.7 Rata-rata Pendapatan Nelayan .....	80
Tabel 5.8 Pengeluaran BBM.....	83
Tabel 5.9 Pengeluaran Bahan Pokok Rumah Tangga .....	87
Tabel 5.10 Tabel Setelah Reklamasi berpengaruh buruk pada lingkungan .....	88
Tabel 5.11 Komunikasi Antar Nelayan.....	91
Tabel 5.12 Komunikasi dengan Keluarga .....	92
Tabel 5.13 Pengetahuan dan komunikasi dengan CSR CPI.....	95
Tabel 5.14 Akses pelatihan kerja bagi nelayan .....	97

Tabel 5.15 Ganti Rugi bagi nelayan.....	98
Tabel 5.16 Aspirasi Dan Tindak Lanjut Yang Diberikan Oleh CSR CPI Kepada Nelayan Tersampaikan Dengan Baik .....	100
Tabel 5.17 Peran CSR CPI Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Nelayan....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Terdapat 15.704 pulau yang terdiri dari beberapa pulau dengan dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) wilayahnya merupakan lautan yang meliputi laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Hal tersebut yang membawa kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara kepulauan dengan seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. (Subianto:2014).

Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Bahkan ada sebuah anekdot yang menyebut bahwa nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut. Kondisi Indonesia yang didominasi oleh perairan atau laut mengakibatkan masyarakat Indonesia yang bermukim di sepanjang pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. (Karlina:2020)

Masyarakat yang berada di pesisir sangat memanfaatkan perairan laut sebagai sumber kehidupan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir. Mempertahankan kebutuhan hidup keluarga dan kelompok nelayan merupakan sebuah faktor utama yang mampu mendorong masyarakat pesisir memilih profesi sebagai nelayan. (Karlina:2020). Seperti halnya yang dikatakan oleh responden nelayan di Kelurahan Panambungan berinisial J bahwa

”Dari kecil kita punya bapak sudah ajak kita ini untuk hidup di laut kerja-kerja nelayan karena laut itu kayak rumah *ta tempatta* cari nafkah untuk keluarga dek” (Wawancara pada tanggal 9 Desember 2021).

Menurut Satria karakteristik masyarakat nelayan secara sosiologis berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam mengelola atau memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Para nelayan mengalami perubahan sumber daya yang tidak teratur, yang dimana pada saat bersamaan hasil penangkapan menjadi berkurang, sehingga para nelayan tersebut harus mencari lahan penangkapan yang baru. (Satria:2015).

Nelayan buruh (*pandega*) adalah kelompok-kelompok sosial pada masyarakat pesisir yang rentan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dan kemiskinan. Nelayan tradisional seperti nelayan jukung, pedagang ikan eceran, pemilik industri olahan berskala kecil, penyedia jasa tenaga, pemilik warung makanan minuman, dan pelaku usaha mikro lainnya. Hanya sebagian kecil dari masyarakat pesisir yang merupakan pemilik perahu besar dan nelayan yang memiliki usaha berskala besar. (Kusnadi:2015)

Perekonomian masyarakat pesisir ditopang oleh kegiatan penangkapan hasil laut, peran ekonomi nelayan sangat menentukan intensitas dan dinamika perekonomian di wilayah tersebut. Karena itu, kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan akan menghambat mobilitas kerja dan perkembangan perekonomian sosial-ekonomi wilayah pesisir. (Kusnadi:2015).

Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan secara simultan dapat terhubung dan dapat dilakukan untuk beberapa bidang kehidupan yang saling berkaitan. (Soekanto:2017).

Dalam buku berjudul Reklamasi di Indonesia yang terbit tahun 2019, Kalolo mengungkapkan bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia relatif semakin dibutuhkan di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan ruang yang muncul karena pertumbuhan ekonomi dan kenaikan paras laut. Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bukan merupakan hal yang baru karena telah dilakukan setidaknya sejak era Orde Baru. Tidak ada pencatatan khusus tentang waktu pertama kali reklamasi dilaksanakan di Indonesia namun pada tahun 1980 Pemerintah Kotamadya Ambon melaksanakan reklamasi di pantai Mardika. Pada saat yang bersamaan tercatat juga proyek reklamasi di pantai Utara dilaksanakan pada kawasan Ancol dan Pluit. Pada awal tahun 1990-an juga telah dilaksanakan reklamasi di kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Pantai Indah Kapuk. Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi tersebut relatif kecil dan bersifat lokal, hingga untuk pertama kalinya pemerintah menginisiasi pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta tahun 1995 yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia. pada tahun 1980-1990 tercatat reklamasi relatif banyak

dilakukan di berbagai kota di Indonesia diantaranya Manado, Makassar, Ternate, Surabaya, Tangerang dan Denpasar. (Direktorat Jasa Kelautan:2019)

Reklamasi lahan pesisir merupakan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hal tersebut yang menjadikan pembahasan mengenai reklamasi lahan pesisir cukup menarik. Karena dapat ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat wilayah pesisir. Terkhusus pada nelayan yang menggantungkan sumber kehidupannya pada laut. Sehingga reklamasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan di Kota Makassar.

Masalah nelayan dan kemiskinan memiliki akar yang cukup kompleks. Dikemukakan empat masalah dasar yang dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan, yakni, pertama, kualitas hidup yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Kualitas hidup yang dimaksud kesehatan, lingkungan, dan aspek sosial lainnya. Kedua, keterbatasan daya jangkauan pemasaran hasil produksi sumber daya hasil laut yang dipunyai oleh para nelayan, hal ini berkaitan erat dengan masalah dasar sebelumnya yang berakibat pada mutu hasil produksi yang rendah. Ketiga, keterbatasan akses kelompok masyarakat nelayan terhadap sumber daya finansial, teknologi, dan informasi. Keempat, keterbatasan kualitas kelembagaan yang dimiliki. Keterbatasan kelembagaan bukan hanya bersumber dari sisi internal kalangan nelayan, melainkan juga berasal dari faktor eksternal, seperti perangkat hukum yang melindungi, pengembangan organisasi, tingkat kemajuan koperasi nelayan, dan atau lingkungan yang menempatkan kelembagaan

nelayan khususnya pada saat berhadapan dengan kekuatan kelembagaan swasta nasional dan asing pada kondisi yang tidak berimbang. (Arifin:2006).

Reklamasi *Centre Point of Indonesia* merupakan pemicu munculnya berbagai masalah sosial ekonomi bagi para nelayan di kelurahan Panambungan. Reklamasi yang tidak memperhatikan pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dapat mengakibatkan degradasi lingkungan pesisir, hal ini sangat berpengaruh terhadap hilangnya potensi sumber daya hayati pesisir terutama beberapa biota laut yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, begitu juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat, bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan selain melaut, mereka tidak memiliki alternatif usaha lain selain menjadi nelayan, dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka. Oleh karena itu, perlu suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, yang tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan saja tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat, sehingga dampak sosial ekonomi masyarakat juga dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pemerintah selaku pengampu kebijakan (Mustaqim:2015).

Awal pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* pada tahun 2009 sampai 2013 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, maka aktivitas reklamasi pada tahun 2013 hingga saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama

dengan PT. Yasmin Bumi Asri. Pada tanggal 1 November 2013 keluar dua Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan yakni Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri kemudian disusul Surat kedua dengan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Keluarnya Izin dan penandatanganan MOU dengan PT. Yasmin Bumi Asri dan kemudian menggandeng Ciputra Development Tbk. (Kamal:2017).

Dalam reklamasi pantai tersebut di butuhkan dana sampai berpuluh-puluh triliun rupiah maka dari pemerintah menggandeng investor dalam pembangunannya. Beberapa investor yang sudah menimbun pantai dikota makassar yaitu PT. Laburino, PT. Vacra Artha Manika, PT. Pelaksana Jaya Mulia, PT. Sinar Amalia Pratama, PT. Asindo, PT. Mariso Indoland, PT. Puncak Bumi Gemilang, PT. Mega Surya Nusa Lestari, PT. Central Cipta Bersama, PT. Kibar Makassar Bisnisland, PT. Bosowa Property, *Centre Point of Indonesia*, PT. GMTD dan lain-lain. (Suilaty:2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan?
2. Apa sajakah faktor-faktor pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia*

terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan?

3. Bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap penanggulangan kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan.
3. Untuk mengetahui Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap penanggulangan kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna sebagai bahan atau referensi bagi masyarakat atau peneliti selanjutnya dalam menganalisis atau mengidentifikasi Analisis Pembangunan Reklamasi Lahan *Centre Point of Indonesia* Terhadap Kemiskinan Nelayan yang melibatkan para nelayan dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menambah wawasan pada pembaca khususnya yang menggeluti bidang studi Sosiologi agar dapat membuka pikiran bahwa dengan Pembangunan Reklamasi Lahan Pesisir yang dilakukan oleh

pemerintah dan pemangku kepentingan pada masyarakat pesisir terkhusus pada nelayan akan memicu terjadinya dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan nelayan sehingga hal tersebut menarik untuk dibahas.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait reklamasi lahan pesisir diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menentukan kebijakan ataupun kompensasi maupun alternatif masalah sosial ekonomi bagi nelayan yang terdampak sebagai salah satu bahan pertimbangan dan pedoman pengambilan keputusan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dipihak yang berbeda. Adanya penyelerasian yang terbangun antara aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia, pelaksanaan yang dihadapkan tidak menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan, baik secara geografi maupun demografis. (Jamaluddin:2016).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan lingkungan hidup yang dasar hukumnya tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jamaluddin:2016).

Pembangunan atau pembenahan faktor lingkungan bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah ada sejak manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya karena kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungannya. Demikian pula, sebaliknya bahwa kelestarian lingkungan sangat bergantung juga pada peranan manusia dalam pembenahannya. Pembangunan lingkungan dapat dilihat dari segi sumber daya alam, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian, pembuatan bedungan air untuk irigasi, dan

sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia agar bisa hidup lebih sejahtera. Dengan syarat, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terjaga agar tidak membawa malapetaka bagi manusia itu sendiri (Jamaluddin:2016).

## **B. Reklamasi Lahan Centre Point of Indonesia**

Untuk memahami suatu permasalahan mengenai reklamasi, beberapa hal akan dibahas guna melakukan suatu pendekatan terhadap masalah reklamasi. Pendekatan ini dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan mengenai pengertian reklamasi, syarat dan kebijakan reklamasi, serta dampak reklamasi.

### **1. Pengertian Reklamasi**

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
- b. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti

rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal-kanal, membuat tanggul/polder dan memompa air keluar maupun dengan pengerukan. (Djakapermana:2013)

- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2014 Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. (Permen:2014)
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase. (BPHN:2012)

## **2. Syarat dan Kebijakan Reklamasi**

Menurut Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;

- c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Dalam Modul Direktorat Jasa Kelautan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase. Merujuk pada definisi tersebut maka kegiatan reklamasi merupakan suatu instrumen pembangunan yang mengubah bentang laut menjadi darat yang bertujuan meningkatkan manfaat/nilai tambah wilayah pesisir dengan tetap memperhitungkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pada pasal 34 UU Nomor 27 Tahun 2007 dan penjabarannya pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 telah disampaikan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat;  
Untuk menjaga keberlanjutan dan penghidupan masyarakat maka reklamasi wajib memberikan akses pada masyarakat menuju pantai, mempertahankan mata pencaharian yang bersumber dari kelautan dan perikanan, memberi kompensasi dan memberdayakan masyarakat terdampak.
- b. Keseimbangan Antara Kepentingan Pemanfaatan dan Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Fungsi lingkungan pesisir

dan pulau-pulau kecil harus tetap diperhatikan dalam kepentingan pemanfaatan reklamasi. Untuk mencapai hal tersebut maka reklamasi wajib meminimalkan dampak oseanografi, batimetri, kesetimbangan pantai, kualitas air dan tidak menimbulkan degradasi ekosistem pesisir. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan batasan dan larangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 berupa:

- Larangan pengambilan material reklamasi dari pulau kecil terluar, kawasan konservasi perairan, pulau kecil dengan luas kurang dari 100 Ha, kawasan ekosistem penting (mangrove, lamun, terumbu karang) dan pulau kecil yang apabila ditambang menimbulkan kehilangan luas lebih dari 10% dari luas pulau;
- Larangan pelaksanaan reklamasi di pantai umum, wilayah kelola masyarakat adat, alur laut dan kawasan konservasi perairan (kecuali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi)

### **3. Persyaratan Teknis Pengambilan, Pengerukan, dan Penimbunan Material Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wajib:**

- Menghindari metode yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (*mud explosion*), gelombang lumpur (*mud wave*), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- Menggunakan material tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan

berbahaya dan beracun (B3)

- Menggunakan sistem tanggul diantaranya kantong pasir (*sand bag*) dan *silt barricade* untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

### **C. Pandangan Mengenai Kemiskinan dan Teori Pembangunan**

Fenomena kemiskinan sebagai realitas yang berlapis-lapis memang sangatlah kasatmata. Ukuran kemiskinan tidak lagi sekedar mengenai kekurangan makanan, tetapi sudah mencapai tahapan yang ekstrem hingga mencapai level ketidakterediaan makanan bagi masyarakat tertentu. (Syawie:2011).

Dalam karya Louis-Marie berjudul *Analysis of Multidimensional Poverty Theory and Case Studies* terbitan 2015, memandang kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang mengandung berbagai bentuk ketidakadilan yang bersumber dari pencegahan sosial yang di dalam pendistribusian kondisi kehidupannya yang esensial terhadap martabat manusia. Kondisi yang berkaitan dengan individu, rumah tangga dan komunitas mengenai beberapa kebutuhan dasar sebagai berikut: pendapatan, pendidikan, kesehatan, makanan bernutrisi, air bersih/sanitasi, pekerjaan, perumahan, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar, dan partisipasi dalam komunitas/kedamaian. (Louis-Marie:2015).

Menurut Robert Chambert 1983 (dalam Hasbi, 2019), kemiskinan berkaitan dengan masalah *deprivasi* sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi.

Selanjutnya Robert Chambers dalam karyanya berjudul *Poverty and livelihoods: Whose Reality Counts?* Pada tahun 1995, memandang kemiskinan lebih jauh, Chambers menyebutkan bahwa terdapat delapan penyimpangan yang terjadi sehingga menghasilkan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Kedelapan penyimpangan tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang tidak terlihat namun memiliki korelasi terhadap kemiskinan, berikut kedelapan penyimpangan penyebab kemiskinan;

1. *Poverty* (kekurangan), hal tersebut merujuk pada ketiadaan pendapatan, aset dan kebutuhan dasar. *Poverty* juga menyertakan beberapa hal yang lebih dari pendapatan yang sedikit, namun terdapat beberapa dimensi yang dapat mencakup kekurangan yakni seperti kelemahan fisik, terisolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh responden nelayan berinisial MT yang merupakan nelayan penyelam bahwa

“*Katte inne totoayya tenamo na kikassa anne boya juku kah pa'risi tommi kalenga gappaka takkancingja ri lalang je'neka*” (wawancara 11 November 2021) beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah tua dan sudah tidak kuat untuk mencari ikan karena beliau sudah merasakan sakit di tubuhnya dan mengkhawatirkan kondisinya di dalam air (lahan tangkap)

2. *Social inferiority* (inferioritas sosial), hal tersebut dapat dikaitkan dengan hidup dan lingkaran kehidupan. Inferioritas sosial dapat didefinisikan secara sosial sebagai inferior atau ketidakberuntungan, melibatkan gender, kasta, ras dan kelompok etnik atau merasa “lebih rendah” dalam istilah kelas, kelompok

sosial atau pekerjaan.

3. *Isolation* (isolasi) merupakan kondisi termarginalkan, terpinggirkan dan terjatuhkan. Masyarakat miskin dapat terisolasi secara geografi, kehidupan di area terbelakang; terisolasi komunikasi, ketiadaan hubungan dan informasi, serta tidak mampu membaca; terisolasi oleh kesulitan akses untuk mendapatkan pelayanan sosial dan pasar; dan terisolasi dengan ketiadaan dukungan ekonomi dan sosial. Dari penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kelurahan Panambungan yang sebagian besar tidak dapat membaca hanya mampu menggantungkan aspirasinya pada ketua nelayan yang masih cenderung memiliki batasan komunikasi kepada pihak pelaksana reklamasi lahan CPI
4. *Physical weakness* (fisik tubuh yang lemah), hal ini dapat berupa disabilitas, penyakit dan luka. Tubuh yang rentan terhadap penyakit dan keterbatasan menjadikan individu berada dalam kondisi yang serba terbatas. Masyarakat yang memiliki tubuh yang rentan tidak mampu menjadi individu yang produktif sehingga memiliki ketergantungan dengan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nelayan berinisial ML bahwa  
*“Nakke inne kodong tongolo ka boya jukuji kuisseng tenami jamangku annej  
kuisseng”* beliau mengungkapkan bahwa beliau memiliki kekurangan dalam hal mendengar (tuli), beliau hanya mampu menangkap ikan saja (wawancara tanggal 10 Desember 2021)
5. *Seasonality* (musiman), petani dan nelayan merupakan pekerjaan yang dapat

digolongkan sebagai profesi musiman. Dalam musim hujan para petani akan mengalami kesulitan untuk menanam komoditas yang menjanjikan, begitu pula yang terjadi pada nelayan, saat musim hujan yang dapat menyebabkan badai hebat dapat menyebabkan para nelayan cenderung memiliki ancaman di laut sehingga menyulitkan para nelayan dalam proses menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakpastian dalam usaha pemenuhan kebutuhan bagi profesi musiman. Dari informasi dan pengamatan saya di lapangan bahwa para nelayan mengategorikan diri mereka menjadi dua yaitu nelayan musiman dan nelayan tetap, nelayan musiman hanya mencari sumber hasil laut saat mendapatkan informasi terkait meningkatnya jumlah hasil laut yang diperoleh nelayan tetap.

6. *Powerlessness* (ketidakberdayaan): masyarakat miskin adalah para individu yang tidak berdaya. Keterbatasan dan kecemasan yang melatarbelakangi mereka saat ingin mengakses sumber daya, pekerjaan dan pendapatan, ketidakberdayaan menjadikan mereka sulit untuk mengatur dan bernegosiasi. Seringkali lemah secara fisik dan rentan secara ekonomi, mereka tidak memiliki pengaruh dalam sebuah kebijakan. Seperti halnya yang dikatakan responden berinisial F bahwa

“Kita ini orang kecil tidak tahu mau bicara dengan siapa yang kita hadapi orang-orang tinggi kalah kita sama tembok tinggi dan penjaganya disana”

(Wawancara 12 Desember 2021)

7. *Vulnerability* (kerentanan) memiliki dua sisi yakni sisi internal dari ketidakberdayaan dan sisi eksternal berupa resiko dan guncangan. Berarti

kekurangan sarana untuk mengatasi persoalan yang berlangsung. Kerentanan bisa menjadi kondisi dimana individu/kelompok berada dalam perasaan yang kurang aman, sebab ketiadaan jaring pengaman yang bisa menjadi jaminan bagi mereka yang masuk ke dalam wilayah yang rentan.

8. *Humiliation* (penghinaan) hal ini berkaitan dengan harga diri, kebebasan individu terhadap sebuah ketergantungan. Penghinaan menjadi dimensi yang paling terlihat dan jarang dipertimbangkan. Mereka yang berada di dalam kondisi ini, kurang mampu untuk mencari cara dalam mendapatkan akses, misalnya adalah kredit. Masyarakat miskin, cenderung takut untuk mengajukan pinjaman, hal itu dikarenakan ada perasaan untuk dihina dan diganggu, baik secara fisik ataupun mental.

Para sosiolog membedakan kemiskinan menjadi dua (Wardaya:2018) yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu mendapatkan kebutuhan untuk mendukung tingkat kesehatan fisik dan efisiensi minimum yang sering diekspresikan dalam istilah tingkat kecukupan kalori dan nutrisi.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan oleh standar hidup umum dalam berbagai masyarakat dan apa yang secara kultural didefinisikan sebagai miskin tingkat absolut.

Dalam pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, Kemiskinan struktural menjadi faktor kuat sebab terjadinya kemiskinan akibat dari distorsi dibidang politik, sosial dan ekonomi. Distorsi politik merupakan

kondisi terbatas yang dialami seseorang atau sekelompok masyarakat. Ketimpangan penyaluran aspirasi yang dialami masyarakat dibawah distorsi secara politik cenderung langgeng dibandingkan masyarakat lain baik berupa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak maupun pendidikan. Peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi kesempatan bekerja dan berusaha bagi para nelayan serta perlindungan hak yang terabaikan. (Purwanto:2012).

Sebelum melangkah ke sub-bab selanjutnya, penulis akan mengantar pembaca untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai indikator untuk mengategorikan individu atau keluarga sebagai “orang miskin”

Indikator kemiskinan menurut BPS yaitu:

1. Lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang,
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah,
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbai/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester,
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak

tanah,

8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu,
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari,
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik,
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan,
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/SD,
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti sepeda motor(kredit/nonkredit), emas, ternak dan lainnya.

Seseorang atau keluarga dikategorikan miskin jika memenuhi sembilan dari empat belas kategori di atas. (Martono:2018)

Teori pembangunan merupakan teori yang relevan dalam pembahasan ini, pembangunan mempunyai arti yang dinamis, maka tidak dapat dilihat dalam konsep yang statis. Perubahan merupakan elemen dalam sebuah pembangunan. Dalam pembangunan, hal yang ingin dicapai ialah kesejahteraan, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pembangunan menunjukkan sebuah proses kemajuan yang diharapkan mampu menyejahterakan manusia dan struktur sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam karya Jamaludin pada tahun 2016, pembangunan merupakan setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

1. Tahap perencanaan terjadi sebelum pembangunan dilaksanakan, di mana pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Selain menyerap aspirasi, pemerintah juga harus memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakat.
2. Tahap pelaksanaan adalah lanjutan dari tahap perencanaan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pada tahap ini, terdapat tiga cara pelaksanaan, yaitu: secara struktural, secara spiritual, dan gabungan dari kedua cara tersebut (struktural dan spiritual).
3. Tahap evaluasi digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum. Di tahap ini dilakukan suatu analisis terhadap akibat dan efek dari perubahan sosial yang terjadi selama proses pembangunan. Dengan adanya evaluasi akan ditemukan aspek-aspek yang kurang, macet dan mundur dari suatu pembangunan, yang mana hal itu dijadikan dasar untuk melakukan upaya perbaikan dari suatu proses pembangunan.

### **Teori Dependensi Paul Baran**

Salah satu teoritikus yang menjadi pengikut teori ketergantungan adalah Paul Baran menurut Baran hubungan antarnegara di dunia mengindikasikan bahwa pergerakan modal dari Negara Dunia Ketiga ke negara maju sebagai upaya menuju keseimbangan ternyata tidak pernah terjadi. Menurut Baran perubahan orientasi sistem ekonomi paternalistik kepada sistem pasar yang bersifat kapitalik sesungguhnya dapat menjadi langkah awal

untuk mengubah masyarakat ke arah kemajuan yang lebih tinggi. Namun yang terjadi, penerapan nilai-nilai komersial dalam tata hubungan sosial masyarakat feodal justru telah memperkuat eksploitasi terhadap golongan lemah, rakyat. (Martono:2018)

Menurut Swarsono, proses eksploitasi dalam sistem kapitalis ini diiringi pula dengan proses korupsi dan ketidakadilan dalam setiap tingkat struktur pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan pemilik modal dari sistem kapitalis internasional. Akibatnya, akumulasi modal berada pada segelintir orang saja. Menurut Baran, ketika dunia ketiga disentuh oleh kapitalisme, yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. (Martono:2018)

#### **D. Dampak Pembangunan Terhadap Kemiskinan Nelayan**

Kebijakan pembangunan sektoral yang menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi mampu menjadi sebuah perwujudan dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Pembangunan yang demikian harus direvisi karena mengabaikan karakteristik dan perbedaan-perbedaan dalam aspek geografis, tingkat perkembangan masyarakat, dan potensi sumber daya ekonomi. Perbedaan-perbedaan tersebut yang mengharuskan digunakannya paradigma pembangunan yang relevan. Pembangunan selanjutnya harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan bukan hanya sebagai kerangka dasar namun juga memprioritaskan hal tersebut sebagai tujuan secara umum. Menurut Nugroho dalam buku yang digarap oleh Kusnadi pada tahun 2015, disinilah letak relevansi pembangunan

wilayah yang berkeinginan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi sebagai akibat dari kemiskinan dan ketimpangan, serta sumber daya alam yang mengalami penekanan. Pembangunan wilayah juga perlu memperhatikan upaya-upaya pembangunan yang memperhatikan keberlangsungannya masalah-masalah sosial di wilayah pesisir, seperti kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah, kemiskinan dan kesenjangan, keterbelakangan dan kerusakan ekosistem pesisir lautan.

Setiap reklamasi dapat menciptakan dampak yang dialami oleh penduduk yang bermukim di sekitar lahan reklamasi, dalam hal ini reklamasi lahan pesisir yang dapat menciptakan dampak yang cukup signifikan bagi nelayan, baik dampak tersebut berupa dampak positif maupun dampak negatif. (Hikmah:2018)

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan. (Database Peraturan BPK:2017).

Menurut Alatas di dalam skripsinya bahwa implementasi dari pencegahan dampak dari reklamasi berupa dampak sosial ekonomi yaitu kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan dan buruh, sehingga, adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka. Pada sisi lain pembentukan kawasan daratan baru dengan segala turunannya yang harusnya

juga membuka peluang bagi perbaikan kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir tradisional melalui suatu perencanaan terpadu. (Alatas:2017).

Menurut Soetomo, sebagai proses perubahan yang terencana, jelas bahwa masalah sosial yang timbul bukan merupakan hal yang ikut direncanakan. Oleh sebab itu, maka lebih tepat disebut sebagai efek sampingan atau dampak dari proses pembangunan masyarakat. Mengingat bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang saling terkait, maka tidak mengherankan jika perubahan yang terjadi pada salah satu atau beberapa aspek, yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, dapat menghasilkan terjadinya perubahan pada aspek yang lain. Terjadinya dampak yang dikehendaki itulah yang kemudian dikategorikan sebagai masalah sosial. (Mustaqim:2015).

Berikut dampak positif dan dampak negatif reklamasi menurut Mustaqim

### **1.Dampak Positif**

Menurut Mustaqim secara umum, dampak positif dari kegiatan reklamasi sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi, seperti menghidupkan kembali transportasi air, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, serta meningkatkan pendapatan daerah. (Mustaqim:2015).

Kegiatan reklamasi antara lain tentunya pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan

kondisi habitat perairan, perbaikan rejim hidraulik kawasan pantai dan penyerapan tenaga kerja. (Mustaqim:2015).

Reklamasi banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Praktek ini memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, penataan daerah pantai, menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Pulau hasil reklamasi dapat menahan gelombang pasang yang mengikkis pantai, selain itu juga dapat menjadi semacam bendungan untuk menahan banjir rob di daratan. (Mustaqim:2015).

## **2.Dampak Negatif**

Dampak positif dan dampak negatif dapat disadari selama proses reklamasi hingga setelah adanya reklamasi bahkan dapat bersifat berkepanjangan atau berkelanjutan. Namun jika dampak tersebut berupa dampak negatif, tentu dapat meresahkan para nelayan yang bermukim di sekitar wilayah reklamasi. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Soemarwoto, menurut Soemarwoto untuk dapat melihat dan menjelaskan bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi pada suatu kawasan, maka kita harus mempunyai bahan perbandingan sebagai bahan acuan. Salah satu bahan yang dapat menjadi acuan adalah “keadaan sebelum terjadi perubahan”. Batasan penting bagi kita dalam menganalisis terjadinya dampak yaitu, dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan adalah perbedaan antara aspek lingkungan sebelum aktivitas terjadi dengan aspek lingkungan setelah adanya aktivitas tersebut. (Jaya:2012).

Perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir telah berdampak lebih lanjut terhadap perubahan aspek sosial ekonomi, yaitu pertama, terjadinya konflik pemanfaatan lahan, kedua, terjadinya perubahan lokasi lahan penangkapan, ketiga, perubahan penggunaan fasilitas dalam bekerja, keempat, terjadinya perubahan jumlah penghasilan, keenam terjadinya perubahan status pekerjaan dan alih profesi. (Jaya:2012).

#### **E. Faktor-Faktor Kemiskinan Nelayan**

Kemiskinan menurut Soekanto di tahun 2017 sebagai sebuah keadaan di mana seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, memelihara dirinya sesuai taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. (Saekanto:2017).

Menurut Kusnadi dkk di tahun 2004, faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat nelayan bersifat kompleks, tataran kebijakan perlu dirancang dengan model pengembangan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan lintas instansi/lembaga yang terkait, baik dari pihak pemerintah, swasta, berbasis masyarakat setempat, dan berdimensi pada optimalisasi pengembangan potensi yang terdapat di kawasan pesisir. Dengan demikian, persoalan yang dialami masyarakat pesisir bukan semata-mata menjadi tanggung jawab satu instansi daerah, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan. (Kusnadi:2015).

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah dasar yang cukup

kompleks. Terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi kehidupannya. Berikut empat masalah dasar yang dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan, paling tidak dipengaruhi oleh empat hal pokok.

Pertama, kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Kualitas hidup yang dimaksud dapat dalam arti luas yang meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan aspek sosial lainnya. Acuan yang digunakan pada kajian ini adalah kualitas SDM yang berkaitan langsung dengan tingkat produktifitas dan kualitas hasil kerja yang dipunyai. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki para masyarakat nelayan tersebut.

Kedua, keterbatasan daya angkau pemasaran hasil produksi sumber daya hasil laut yang dipunyai oleh para nelayan. Keterbatasan daya jangkau pemasaran dapat berkaitan erat dengan masalah dasar sebelumnya yang berakibat pada mutu hasil produksi yang rendah, skala produksi yang tidak ekonomis, dan ketepatan distribusi. Namun, bukan hal yang tidak mungkin bahwa keterbatasan daya jangkau tersebut disebabkan karena secara struktural kelompok masyarakat nelayan mempunyai daya tawar yang rendah. Kelompok nelayan, di samping memiliki keterbatasan sumber daya manusia, juga memiliki keterbatasan aset produksi, serta kekuatan organisasi dan manajemen yang lemah. Kondisi yang terakhir inilah yang melemahkan posisi kelompok nelayan dalam penentuan harga sehingga terciptanya transformasi struktural akan proses yang sangat lambat.

Ketiga, keterbatasan akses kelompok masyarakat nelayan terhadap sumberdaya finansial, teknologi, dan informasi, melengkapi kedua masalah dasar sebelumnya, keterlambatan adaptasi teknologi kelompok masyarakat nelayan bukan merupakan keterbatasan melekat pada diri nelayan, melainkan kemudahan untuk mengakses guna beradaptasi pada sumberdaya finansial, teknologi dan informasi.

Keempat, keterbatasan kualitas kelembagaan yang dimiliki. Keterbatasan kelembagaan bukan hanya bersumber dari sisi internal kalangan nelayan, melainkan juga bersumber pada faktor eksternal nelayan yaitu seperti perangkat hukum yang melindungi hak para nelayan, pengembangan organisasi, tingkat kemajuan koperasi nelayan dan atau lingkungan yang menempatkan kelembagaan nelayan khususnya pada saat berhadapan dengan kekuatan kelembagaan yang mampu mematikan kekuatan para nelayan dalam pemenuhan kebutuhan. (Arifin:2006).

Kemiskinan menurut Soetisno dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (*natural*) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang dapat terjadi akibat keterbatasan sumber daya lingkungan atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan, kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang dapat terjadi karena struktur sosial yang berlaku di dalam sebuah masyarakat telah menghambat akses masyarakat yang bersangkutan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Dalam konteks Indonesia menganut kapitalistik, kemiskinan yang menimpa masyarakat ialah kemiskinan

struktural (Kusnadi:2015).

Menurut Nugroho, jika kita memahami konteks struktural, faktor penyebab timbulnya kemiskinan tidak hanya dari aspek ekonomi saja seperti pendapatan yang kecil, tetapi juga faktor-faktor ketimpangan akses pada sumber daya sosial, budaya dan politik. Kemiskinan pula disebabkan oleh faktor-faktor yang cukup kompleks dan multidimensional. Para ahli pun memperdebatkan ukuran-ukuran untuk menentukan garis kemiskinan. Jika yang menjadi penekanan fokus untuk memahami kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan sandang, papan (perumahan) dan pangan, maka dalam hal ini bisa dirumuskan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif dan objektif. Sebaliknya, apabila yang menjadi fokus perhatian kita ialah penentuan garis kemiskinan tingkat kesejahteraan sosial, maka ukuran- ukuran yang digunakan bersifat relatif dan kuantitatif. (Kusnadi:2015).

Faktor pendapatan merupakan pintu masuk untuk memahami kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah, yang kemudian mampu menyulitkan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disebabkan oleh berbagai hal yang kompleks termasuk pembangunan, perspektif demikian itulah yang memiliki relevansi dalam memahami kemiskinan nelayan. (Kusnadi:2015).

#### **F. Peran *Corporate Social Responsibility* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan**

Di dalam dunia usaha, memiliki beberapa aspek penting yang telah

ditetapkan sebagai sebuah tanggung jawab sosial, salah satunya ialah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan sebuah perwujudan kesadaran sebuah perusahaan akan pentingnya upaya menjaga dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. (Koesriwulandari:2015).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur oleh pemerintah sejak tahun 1994, dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK-01/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen), untuk menjalankan CSR. Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16(d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perusahaan atau penanaman modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan telah diperhitungkan sebagai biaya tanggungan perusahaan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. (Koesriwulandari:2015)

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang bersifat

berkelanjutan dan berkenaan langsung dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan merealisasikan program-program CSR, perusahaan secara tidak langsung telah memiliki sumbangsi terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang bersifat dapat dihitung dengan nilai, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun dapat ditegaskan bahwa biaya untuk program-program CSR merupakan wujud investasi Perusahaan untuk memupuk modal sosial. (Koesriwulandari:2015).

Hal yang telah dijelaskan diatas merupakan sebuah bukti bahwa entitas keduanya bukanlah dua entitas yang harus saling menegaskan atau saling mengeksploitasi. Di tengah situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih jauh dari sejahtera, maka perusahaan diharapkan untuk memikirkan aspek sosial dan tidak melihat dari keuntungan finansial semata. Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan publik. (Koesriwulandari:2015).

Semakin tinggi kesadaran *stakeholder* akan pengaruh perusahaan terhadap lingkungan maka semakin besar pula tuntutan perusahaan untuk mengakomodasikan pemenuhan kepentingan *stakeholder* dan lingkungan dalam sebuah kebijakan perusahaan. Secara garis besar, kewajiban perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kewajiban Ekonomi (*economic responsibility*),
- b) Kewajiban Hukum (*legal responsibility*),

- c) Kewajiban Etis (*ethical responsibility*),
- d) Kewajiban Lain Tambahan (*discretionary/philanthropic responsibility*) atau *social responsibility*.

Peran CSR yang dihadapkan mampu terealisasikan dalam penanggulangan kemiskinan nelayan ialah sebagai berikut:

- a) Membantu mengurangi biaya hidup masyarakat nelayan yang mengalami peningkatan pengeluaran BBM akibat daya jangkau sumber daya ekonomi yang semakin jauh dan menyita waktu penangkapan ikan, kerang, dan sebagainya.
- b) Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan miskin akibat dari hilangnya lahan tangkap (*ground fishing*) para nelayan di lahan pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* yang dilaksanakan oleh perusahaan Ciputra.
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen dengan menyediakan alternatif usaha bagi para nelayan karena adanya perubahan pendapatan yang signifikan akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan
- d) Meningkatkan wawasan pendidikan masyarakat nelayan miskin dengan pelatihan *skill* dan pendidikan bagi anak para nelayan yang terdampak reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia*.

## **G. Kerangka Konseptual**

Pembangunan yang ideal merupakan pembangunan yang mengindahkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Pembangunan

yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang secara berkesinambungan serta berkelanjutan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan bijak tanpa merusak tatanan kehidupan yang telah ada sebelumnya. Pembangunan yang berpedoman pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan sebuah pembangunan yang secara sadar mengetahui kunci dari keberhasilan pembangunan tersebut. Berdasar pada dasar hukum yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jamaluddin:2016).

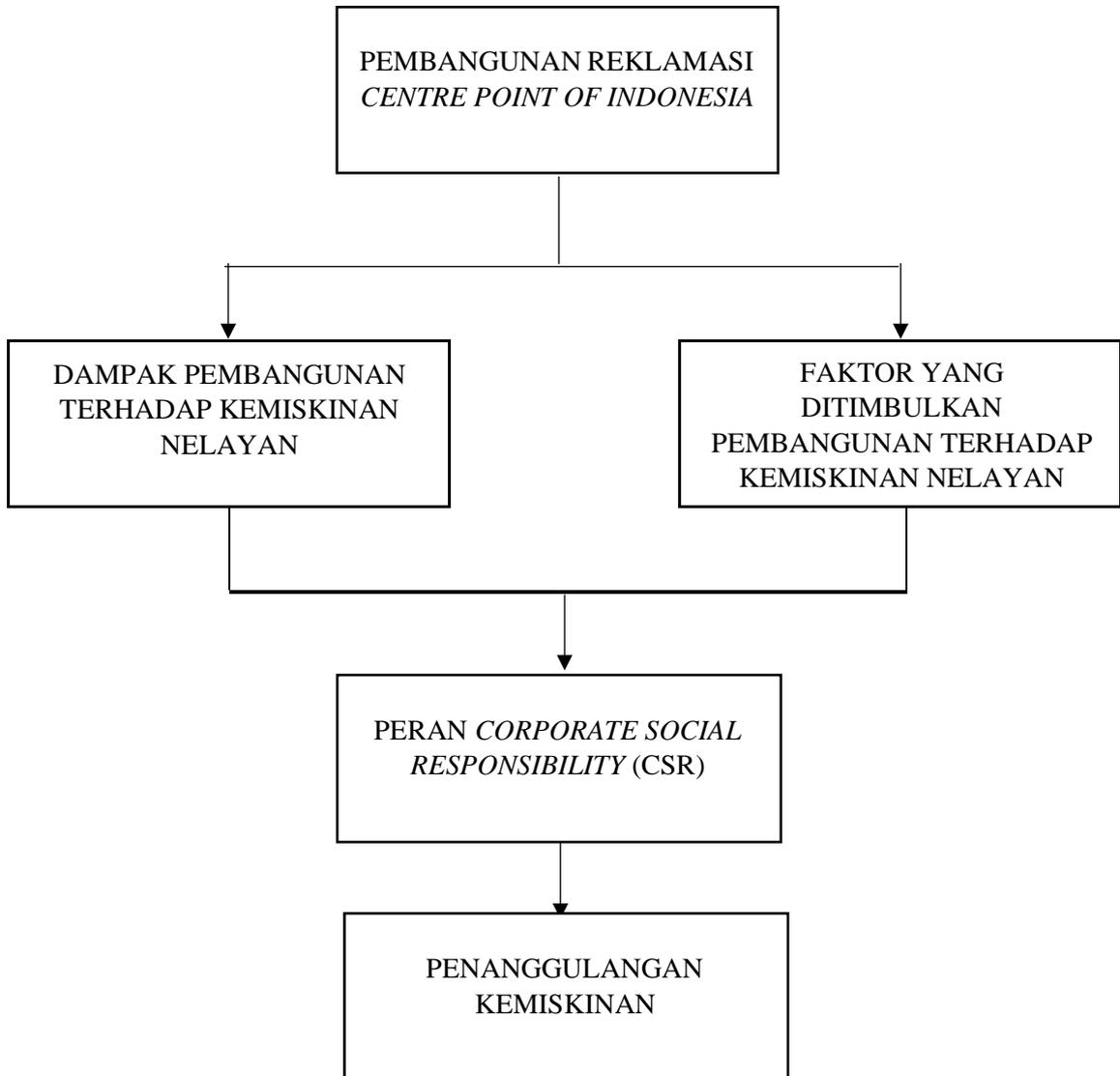
Reklamasi merupakan perwujudan dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat/nilai tambah wilayah pesisir dengan tetap memperhitungkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Reklamasi sebagai sebuah kebijakan negara, kebijakan negara yang muncul dalam bentuk regulasi menjadi permasalahan ketika isi regulasi tidak memberdayakan nelayan dan tidak adanya penegakan hukum kelautan. (Mustaqim:2019).

Pembangunan reklamasi yang tidak mengindahkan AMDAL dan beberapa Undang-Undang yang telah mengatur mengenai pengelolaan hingga persyaratan reklamasi akan menimbulkan dampak bagi para nelayan, dampak positif dapat dirasakan bagi satu pihak yang memiliki kekuasaan dan dampak negatif bagi para nelayan yang tidak memiliki kuasa ataupun peran dalam pembangunann reklamasi tersebut.

Dampak tersebut dapat berupa kemiskinan nelayan, kemiskinan yang mendominasi para nelayan ialah kemiskinan struktural dari sistem yang dianut bersifat kapitalik sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial yang mendasar bagi nelayan. Jika dilihat dari konteks struktural yang menekankan pada faktor-faktor sosial yang diabaikan, maka dampak dan faktor tersebut dapat dianalisis dari pembangunan reklamasi itu sendiri.

Kehadiran program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan mampu terealisasikan sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan guna terjadinya penanggulangan kemiskinan nelayan akibat dari pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* dan mampu menjadi sebuah solusi dari adanya perubahan lingkungan yang mempengaruhi ekonomi masyarakat nelayan.

### Skema Kerangka Konseptual



## H. Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini, peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari uraian penelitian terdahulu ini adalah mengetahui posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Dengan demikian yang peneliti lakukan adalah benar-benar secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud sebagai berikut:

### 1. Hasil penelitian Rilwanu Rahman Alatas, (2017)

Rilwanu Rahman Alatas, (2017) meneliti tentang Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan *Centre Point of Indonesia* Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kombinasi (*mix methods*) atau kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan Rilwanu Alatas (2017) bertujuan untuk mengetahui alasan dilakukannya tindakan reklamasi *Centre Point of Indonesia* serta ingin mengetahui dampak reklamasi kawasan *Centre Point of Indonesia* terhadap pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, Alasan dilakukan tindakan reklamasi kawasan *Centre Point of Indonesia* Kota Makassar diantaranya untuk penataan daerah pantai dan mitigasi bencana. Rencana penggunaan lahan kawasan CPI seluas 157 Ha dengan pembagian untuk pemerintah seluas 50 Ha (32,00 %) sedangkan untuk swasta seluas 107 Ha (68,00 %), yang akan

membangun sebanyak

12 fasilitas untuk ruang publik. Adapun dampak negatif tindakan reklamasi menurut masyarakat nelayan yaitu terganggunya sumberdaya alam, area penangkapan dan jalur akses yang berakibat terjadinya penurunan pendapatan nelayan hingga 20,89 % atau selisih penurunannya  $\pm$  Rp.8.622.000,- setelah adanya reklamasi. Adapun dampak positif yang terjadi selama proses pembangunan berlangsung hingga progresnya lebih dari 35 % khususnya dalam peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat nelayan sama sekali belum dirasakan oleh masyarakat nelayan Kecamatan Mariso.

## 2. Hasil penelitian Suhairah Amaliyah (2020).

Suhairah Amaliyah (2020) meneliti tentang Dampak Pembangunan *Centre Point of Indonesia* Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Panambungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan Suhairah Amaliyah (2020) bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan akibat pembangunan *Centre Point of Indonesia* dan ingin mengetahui pengaruh pembangunan *Centre Point of Indonesia* terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Panambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Perubahan yang terjadi selama rentan waktu proses pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI) antara lain: menurunnya hasil tangkapan nelayan karena keragaman tangkapan berkurang berimplikasi terhadap penurunan jumlah rata-rata pendapatan

nelayan, terjadinya pendangkalan dan akses yang sempit yang juga berimplikasi terhadap penambahan jumlah rata-rata untuk pengeluaran nelayan per trip, adanya kesenjangan disparitas antara pengunjung CPI dengan nelayan dan menurunnya kualitas hidup (sandang, pangan papan) nelayan. Dampak pembangunan CPI terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Panambungan yaitu: pertama, indikator keragaman usaha memiliki dampak negatif tapi tidak secara signifikan terhadap perubahan status pekerjaan responden. Kedua, pembangunan CPI memiliki dampak negatif terhadap perubahan pendapatan responden. Ketiga, pembangunan CPI memiliki dampak negatif terhadap perubahan pengeluaran responden. Keempat, pembangunan CPI tidak secara kontinu memberikan dampak terhadap keaktifan kelompok nelayan di Kelurahan Panambungan.

### 3. Hasil penelitian yang dilakukan Ibnu Mustaqim (2015)

Ibnu Mustaqim (2015) meneliti tentang Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian yang dilakukan Ibnu Mustaqim (2015) ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan pelabuhan Muara Angke terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat perkampungan nelayan Muara Angke.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan dalam hal pendapatan rumah tangga, rata-rata responden mengalami penurunan yaitu

pada kelompok pedagang dan pengolah kerang serta non perikanan, penurunan sebesar lebih dari 3 kali lipat (360%) dialami oleh nelayan dari pendapatan awal sebelum pembangunan pelabuhan. Kenaikan hanya terjadi pada kelompok pedagang dan pengolah ikan, yaitu sebesar 10% atau senilai Rp 1.166.667,00. Sedangkan, perubahan pengeluaran rumah tangga, kelompok pedagang dan pengolah ikan dan nelayan mengalami kenaikan. Terutama pada kelompok nelayan dengan kenaikan sebesar 53%, penurunan dialami oleh kelompok pedagang dan pengolah kerang dan non perikanan dengan persentase penurunan masing-masing sebesar 6%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah ketiga penelitian di atas tidak membahas mengenai kemiskinan, sedangkan penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai dampak reklamasi *Centre Point of Indonesia* serta faktor-faktor yang ditimbulkan oleh pembangunan reklamasi terhadap kemiskinan yang dialami nelayan serta peran CSR *Centre Point of Indonesia* dalam penanggulangan kemiskinan nelayan lebih spesifik di Kelurahan Panambungan. Hasil penelitian dianalisis secara Sosiologis menggunakan pendekatan kemiskinan dan pembangunan. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara spesifik mengenai kemiskinan yang dialami para nelayan sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan, serta menganalisis faktor-faktor yang ditimbulkan oleh pembangunan reklamasi lahan *Centre Point of Indonesia* terhadap kemiskinan nelayan Kelurahan Panambungan, serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat para nelayan Kelurahan Panambungan dalam hal peran CSR *Centre*

*Point of Indonesia* dalam penanggulangan kemiskinan nelayan di Kelurahan Panambungan.